

## ABSTRAK

**Widianty, 2024** “*Politik Hukum Pemekaran Wilayah Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Nirwana Halide

Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: untuk mengetahui latar belakang pemekaran Kecamatan Sabbang Selatan serta mengetahui proses politik hukum pemekaran wilayah Kecamatan Sabbang Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber data, primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar belakang wacana pemekaran Sabbang Selatan dimulai pada tahun 2000 yang dilakukan oleh masyarakat yang terisolir dikarenakan jauhnya jarak tempuh yang dilalui untuk melakukan kegiatan di ibukota kecamatan, sehingga masyarakat melakukan pengusulan untuk dibentuknya kecamatan baru yaitu Kecamatan Sabbang Selatan. Proses politik hukum pemekaran Kecamatan Sabbang Selatan terdiri dari tiga tahap besar yaitu 1) Usulan masyarakat, 2) Pada saat usulan telah masuk ke program legislasi daerah (Prolegda), 3) Terbitnya Peraturan Daerah. Pandangan fiqih *siyasah*, pemekaran dan pelayanan kependudukan termasuk dalam ruang lingkup fiqih *dusturiyah* yaitu mengenai pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain dan juga hukum masalah mursalah, karena tujuan pemekaran yang dilakukan guna pelayanan kependudukan adalah mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi rakyat. Pada Kecamatan Sabbang Selatan telah banyak mencapai kemaslahatan yang perlu terus dilakukan inovasi perbaikan guna mencapai kemaslahatan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Pemekaran, Wilayah.